

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM MEWUJUDKAN KETERWAKILAN POLITIK YANG ADIL DI DAPIL JAKARTA SELATAN PADA PEMILU 2024

Fattiha Syanira Nirmala Amantha¹, Shella Sofiana², Shandy Gupa Pratama³, Lia Wulandari⁴

2310413043@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413064@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310413133@mahasiswa.upnvj.ac.id³, lia.wulandari@upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dalam mewujudkan keterwakilan politik yang adil di Dapil Jakarta Selatan pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan representasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi dinamika kampanye, distribusi sumber daya, dan pengaruh media dalam sistem pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan peluang bagi caleg dengan popularitas tinggi, keadilan representasi tetap terhambat oleh ketimpangan sumber daya kampanye, dominasi internal partai, dan rendahnya literasi politik di kalangan pemilih. Oleh karena itu, untuk mencapai keterwakilan politik yang lebih adil diperlukan peningkatan transparansi dalam distribusi sumber daya, perbaikan mekanisme internal partai, serta upaya peningkatan edukasi politik yang dapat mengatasi disparitas yang ada dan memperkuat demokrasi elektoral di Jakarta Selatan.

Kata Kunci: Jakarta Selatan, Keadilan Representasi, Keterwakilan Politik, Pemilu 2024, Sistem Proporsional Terbuka.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the open-list proportional representation system in achieving fair political representation in the South Jakarta electoral district during the 2024 General Election, as well as to identify the factors influencing representational justice. Utilizing a descriptive qualitative approach through literature review, the study evaluates the dynamics of election campaigning, the distribution of campaign resources, and the influence of media within the electoral system. Research findings indicate that although the open-list proportional system is capable of increasing voter participation and providing opportunities for high-profile candidates, fair representation remains hindered by imbalances in campaign resource allocation, internal party domination, and low levels of political literacy among voters. Therefore, to achieve more equitable political representation, it is essential to enhance transparency in resource distribution, improve internal party mechanisms, and intensify political education efforts to overcome existing disparities and strengthen electoral democracy in South Jakarta.

Keywords: South Jakarta, Representational Fairness, Political Representation, 2024 Election, Open-List Proportional System.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat diberi kesempatan untuk menggunakan hak politiknya secara langsung guna menentukan siapa yang akan memimpin serta merancang arah kebijakan negara. Di Indonesia, pemilu tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk mengganti pemimpin atau mengatur rotasi kekuasaan secara berkala, tetapi juga menjadi cerminan dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik serta seberapa besar suara mereka terwakili dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Untuk memperkuat kualitas demokrasi, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat langsung memilih calon anggota legislatif (caleg) yang mereka anggap layak. Tujuannya adalah agar para caleg tidak hanya bergantung pada kekuatan partai, tetapi juga membangun relasi yang kuat dengan masyarakat pemilih—melalui rekam jejak, visi-misi, dan kedekatan personal. Sistem ini diharapkan mendorong lahirnya wakil rakyat yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Surbakti et al., 2020: 45).

Secara teori, sistem proporsional terbuka dianggap lebih adil karena memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan secara spesifik siapa yang mewakili mereka. Caleg yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak, bukan hanya karena dipilih oleh partai. Artinya, pemilih memiliki kontrol yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadirkan tantangan tersendiri. Persaingan antar caleg, terutama dari partai yang sama, tidak jarang memicu konflik internal, kampanye negatif, dan bahkan praktik politik uang. Di sisi lain, ketimpangan dalam hal akses media, dana kampanye, dan kekuatan jaringan menyebabkan caleg-caleg tertentu lebih unggul, meskipun belum tentu memiliki kualitas representasi yang lebih baik (Aspinall & Mietzner, 2019: 87).

Fenomena ini semakin menarik jika ditinjau dalam konteks wilayah perkotaan seperti Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi serta karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang sangat beragam. Jakarta Selatan juga memiliki profil pemilih yang tergolong kritis, memiliki akses informasi yang luas, dan kesadaran politik yang relatif tinggi. Meski demikian, tantangan tetap muncul—mulai dari pengaruh besar media sosial dalam membentuk opini, ketimpangan sumber daya antar caleg, hingga strategi kampanye yang lebih menekankan popularitas daripada substansi.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penting untuk menelaah bagaimana sistem proporsional terbuka benar-benar diimplementasikan di wilayah Jakarta Selatan, khususnya pada Pemilu 2024. Pemilu kali ini menjadi momen penting untuk menilai kualitas demokrasi Indonesia saat ini: apakah sistem yang diterapkan benar-benar mampu mendorong keterwakilan politik yang adil, atau justru memperkuat dominasi mereka yang memiliki modal politik dan ekonomi lebih besar (Tapsell, 2021: 112). Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara kritis realitas di lapangan dan mengevaluasi efektivitas sistem proporsional terbuka dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, memahami fenomena, serta menelaah secara mendalam konteks sosial yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan bukan untuk tujuan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik populasi atau fenomena tertentu yang sedang diteliti (Jadidah et al., 2023). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penjabaran data semata, tetapi juga melakukan interpretasi secara mendalam terhadap data yang diperoleh, guna menemukan pola, makna, serta relasi antar konsep yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Memberikan Keterwakilan Politik yang Adil di Dapil Jakarta Selatan pada Pemilu 2024

Dengan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024, pemilih di Dapil Jakarta Selatan memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih caleg atau calon legislatif yang mereka inginkan, bukan hanya partai politik tertentu. Dalam demokrasi elektoral, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan representasi politik dengan mencerminkan suara rakyat melalui kursi legislatif yang diduduki oleh caleg dengan suara terbanyak (Jurdi et. al., 2023). Namun, seberapa efektif sistem ini dalam memberikan keterwakilan politik yang adil masih diperdebatkan, terutama ketika digunakan di wilayah kota besar seperti Jakarta Selatan.

Data yang dikumpulkan dari rekapitulasi suara KPU pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka memungkinkan caleg dari partai yang sama untuk bersaing secara bebas (Hardiyanti et al., 2022). Meskipun berasal dari partai kecil, caleg dengan popularitas tinggi dan strategi kampanye yang berhasil mendapatkan banyak suara. Hal ini menunjukkan bahwa suara pemilih lebih penting daripada posisi caleg di nomor urut partai dalam sistem proporsional tertutup.

Namun, beberapa tantangan muncul dalam hal keadilan keterwakilan. Anggota legislatif yang terpilih tidak sama dengan anggota legislatif lain yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, minoritas, atau perempuan. Dalam praktiknya, caleg dengan sumber daya kampanye yang signifikan dan jaringan politik yang kuat cenderung memiliki keunggulan, meskipun sistem ini secara teori memungkinkan partisipasi yang lebih besar. Sistem proporsional terbuka cenderung menguntungkan aktor politik yang sudah mapan yang menyebabkan kelompok marginal memiliki lebih sedikit kesempatan untuk diwakili.

Meskipun partisipasi pemilih dalam pemilihan caleg secara langsung meningkat, sebagian besar pemilih di Dapil Jakarta Selatan masih memilih berdasarkan figur yang populer daripada rekam jejak atau visi misi caleg. Hasil dari studi pustaka dan observasi media massa menunjukkan bahwa banyak dari partisipasi pemilih dalam memilih caleg karena faktor personal branding, kedekatan emosional, atau bahkan karena seringnya caleg tampil di media sosial. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas representasi politik yang dihasilkan, karena keterwakilan yang "adil" mencakup kualitas perwakilan dan kuantitas suara.

Di Jakarta Selatan, partai-partai besar masih mendominasi perolehan kursi seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat suara yang ada (Putri et al., 2024). Partai-partai besar lebih mampu mengawasi suara secara sistematis, mendistribusikan sumber daya, dan membangun citra caleg, meskipun caleg dari partai kecil memiliki lebih banyak peluang. Hal ini menyebabkan sedikit keberagaman politik yang terlihat dalam hasil pemilu.

Proses rekapitulasi dan penghitungan suara yang lebih sulit disebabkan oleh sistem proporsional terbuka secara teknis. Banyak pemilih yang tidak memahami secara menyeluruh mekanisme sistem ini, terutama terkait dengan dampak pilihan mereka terhadap perolehan kursi. Dalam sistem proporsional terbuka, suara caleg adalah yang paling penting dalam menentukan kursi legislatif, meskipun sebagian besar masyarakat percaya bahwa memilih caleg dan partai memiliki nilai yang sama. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan sistem tidak efektif dalam menyediakan representasi yang benar-benar sesuai dengan kehendak pemilih.

Namun, sistem ini membantu meningkatkan partisipasi politik. Mereka dapat memilih langsung orang yang mewakili mereka, banyak pemilih merasa lebih terlibat. Mereka juga bertanggung jawab atas kedua partai politik dan konstituen yang secara

langsung memilih mereka, para anggota legislatif harus lebih bertanggung jawab secara pribadi. Beberapa caleg yang terpilih bahkan mengambil pendekatan partisipatif selama kampanye, seperti advokasi berbasis isu lokal, diskusi komunitas, dan dialog warga (Kuswandoro, 2024).

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka di Dapil Jakarta Selatan pada Pemilu 2024 cukup efektif untuk meningkatkan persaingan caleg dan meningkatkan akuntabilitas politik. Namun, sistem ini belum memenuhi syarat untuk keterwakilan politik yang adil terutama karena ketidaksamaan dalam sumber daya kampanye, dominasi figur populer, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemilu itu sendiri. Perbaikan diperlukan dalam bidang pendidikan pemilih, transparansi partai politik, dan peraturan tentang pendanaan kampanye agar sistem ini dapat memberikan keterwakilan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keadilan Keterwakilan Politik dalam Penerapan Sistem Proporsional Terbuka di Dapil Jakarta Selatan

Dalam Pemilu 2024, sistem pemilu proporsional terbuka dirancang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama untuk memilih wakil rakyat secara langsung. Di Dapil Jakarta Selatan, sistem ini memberi pemilih kesempatan untuk memilih tanpa bergantung pada nomor urut caleg yang ditetapkan oleh partai. Tetapi dalam kenyataannya, sistem ini tidak serta-merta memastikan bahwa wakil politik yang adil diberikan. Hasil representasi politik di wilayah ini dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks yang menentukan seberapa kuat suara rakyat terakomodasi di lembaga legislatif.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya kampanye merupakan salah satu kendala utama dalam mencapai keadilan representasi politik. Baliho, iklan di media, kampanye digital, dan pertemuan langsung adalah cara yang lebih baik bagi calon legislatif yang memiliki dana besar untuk menghubungi masyarakat (Wasesa, 2011). Caleg perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan kampanye yang efektif karena mereka berasal dari kelompok minoritas, masyarakat kelas bawah, atau kelompok kelompok lainnya. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak adil. Mereka yang memiliki dana besar untuk kampanye memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Bukan karena pemilihan tidak sah, tetapi karena tidak semua caleg memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan dikenal yang mengakibatkan proses pemilu menjadi tidak adil.

Sistem ini juga cenderung mendorong politik yang didasarkan pada figur atau personalitas. Banyak caleg yang memanfaatkan popularitas pribadi mereka seperti selebritas, influencer, atau public figure untuk menarik simpati pemilih di Jakarta Selatan yang notabene adalah wilayah perkotaan dengan banyak perhatian media (Zusrieka et al., 2024).. Dari satu sisi hal ini masuk akal, tetapi caleg yang lebih terkenal dan lebih berbakat sering disingkirkan oleh figur populer. Hal ini menyebabkan perbedaan dimana persepsi dan citra lebih mempengaruhi keputusan pemilih daripada kualitas gagasan atau rekam jejak caleg.

Faktor lain yang sangat penting adalah pemilih tidak terbiasa dengan politik. Banyak orang masih belum memahami mekanisme sistem proporsional terbuka sepenuhnya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa memilih caleg dan partai memiliki efek yang sama, meskipun suara terbanyak untuk caleg secara individu adalah yang paling penting. Ketidapkahaman ini menyebabkan banyak pemilih memilih calon berdasarkan nama yang dikenal, hubungan emosional, atau urutan dalam daftar suara, daripada mempertimbangkan visi dan misi calon. Jadinya kualitas representasi yang dihasilkan juga tidak optimal.

Struktur internal partai politik sangat penting untuk menghasilkan representasi yang

adil. Meskipun sistem proporsional terbuka memberi caleg kesempatan yang lebih besar untuk bersaing secara langsung, banyak partai masih lebih suka mendukung caleg tertentu saja. Di Jakarta Selatan, beberapa partai besar terlihat berkonsentrasi pada memberikan sumber daya kepada "caleg unggulan" yang dianggap memiliki peluang besar untuk menang, sedangkan caleg lain dari partai yang sama seringkali dibiarkan berjuang sendiri (Abdullah & Ummah, 2024). Praktik ini memiliki spektrum keterwakilan yang terbatas karena hanya segelintir individu yang menerima dukungan dan panggung yang maksimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media apalagi media sosial saat ini menjadi arena pertempuran utama dalam kampanye politik. Keunggulan unik diberikan kepada caleg yang aktif dan mahir dalam mengelola konten digital, membangun narasi pribadi, dan berhubungan dengan pemilih. Reputasi yang baik di media sosial tidak selalu berkorelasi dengan kinerja atau integritas kandidat. Media digital juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu atau membuat pencitraan semu. Jika pemilih tidak kritis dalam menyaring informasi, representasi politik yang dihasilkan cenderung bersifat simbolis semata daripada berbasis substansi dan kualitas.

Sebagai hasil dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem proporsional terbuka dalam memberikan keterwakilan politik yang adil di Dapil Jakarta Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pemilu, tetapi juga oleh komponen struktural dan kultural yang terkait. Dinamika representasi yang tidak ideal dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan media digital, ketidakseimbangan strategi partai, politik pencitraan, dan tingkat literasi politik yang rendah. Sistem ini perlu diperbaiki secara menyeluruh, termasuk peningkatan edukasi politik, meningkatkan transparansi partai, dan memberi semua calon legislatif kesempatan yang sama untuk bersaing..

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Dapil Jakarta Selatan, sistem pemilu proporsional terbuka menunjukkan kualitas. Sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan meningkatkan persaingan antar calon legislatif. Pemilih dapat memilih langsung wakil yang dianggap paling representatif, meningkatkan akuntabilitas politik. Ini menunjukkan hubungan yang baik antara wakil rakyat dan konstituennya; beberapa kandidat bahkan mengambil pendekatan kampanye yang berbasis masalah lokal dan partisipatif.

Namun demikian, sistem ini belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam mewujudkan keterwakilan politik yang adil. Hambatan utama untuk representasi yang setara dan inklusif termasuk dominasi partai-partai besar, ketidaksesuaian sumber daya kampanye, dan kurangnya literasi politik masyarakat. Dengan akses media yang luas, popularitas yang tinggi, dan dukungan struktural dari partai, sistem ini cenderung menguntungkan kandidat. Caleg dari kelompok marginal seperti perempuan dan orang-orang dengan latar belakang ekonomi terbatas, menghadapi tantangan yang signifikan untuk diakui dan dipilih.

Faktor-faktor lain seperti preferensi partai terhadap kandidat unggulan, ketidaksetaraan dalam struktur internal partai, dan pengaruh media sosial, yang seringkali menciptakan pencitraan yang tidak jelas, semuanya berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan dalam proses representasi politik. Meskipun sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang lebih besar untuk persaingan, keterwakilan politik yang adil masih belum mencapai tingkat yang penuh. Agar sistem ini dapat mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan merata di masa mendatang, diperlukan perbaikan mendasar dalam pendidikan politik, undang-undang pendanaan kampanye, dan transparansi partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. K., & Ummah, A. (2024). Analisis Menurunnya Perolehan Kursi Caleg Muda di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu Tahun 2024 Dapil Jakarta Selatan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 349-360.
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, F. (2012). Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi Parpol dan Kompetensi Kandidat pada Sistem Daftar Terbuka. *Jurnal Ilmu Politik AIPI*, 22.
- Hardiyanti, M., Pratama, P. A., Saputra, A. D., & Sholehah, M. M. A. (2022). Urgensi sistem E-voting dan sirekap dalam penyelenggaraan pemilu 2024. *Journal equitable*, 7(2), 249-271.
- Harnawansyah, M. F. (2019). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50-64.
- Jurdi, S., Teteng, B., & Lukita, F. H. (2023). Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka. *VOX POPULI*, 6(2), 145-161.
- Kuswandro, W. E. (2024). Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian. Universitas Brawijaya Press.
- Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup.
- Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 50-57.
- PARDEDE, D. J. (2024). FENOMENA MONEY POLITIK PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA.
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13-28.
- Putri, K. R., Koesnaedy, S. Z. A., Zahra, D. A. A., Angelina, R., Aldhiyata, D., Larasati, S. R., ... & Subakdi, S. (2024). Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 656-664.
- Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 633-638.
- Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (2022). Analisis Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 88-105.
- Wasesa, S. A. (2011). Political branding & public relations: saatnya kampanye sehat, hemat, dan bermartabat. Gramedia Pustaka Utama.
- Zusrieka, M., Pramesyanti, C. Z., & Salsabila, A. S. (2024). Analisis Peran Verrel Bramasta Sebagai Public Figure Dalam Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Di Media Sosial TikTok. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).